

**IMPLEMENTASI TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Ujian Tengah Semester Metode Penelitian Administrasi Publik)

Oleh

**WULAN WAHYUNINGTYAS
NPM 2416041111**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Grand Theory: Manajemen Pelayanan Publik	12
2.2.2 Middle Theory: Governansi Digital	15
2.2.3 Applied Theory: Transparansi dan Akuntabilitas BOS	19
2.3 Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	27
3.6 Teknik Keabsahan Data	28
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Batubara, 2023). Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus didukung dengan sistem pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan efisien agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sebagai wujud komitmen untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah (Hakim & Enjelita, 2025).

Program BOS menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia karena secara langsung membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional nonpersonalia, seperti biaya kegiatan belajar mengajar, perawatan sarana dan prasarana, serta administrasi sekolah (Nurintan et al., 2025). Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung, dana BOS memegang peranan penting dalam memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan lancar tanpa membebani orang tua siswa. Namun demikian, dalam praktik pengelolaannya masih sering dijumpai persoalan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, terutama pada aspek pelaporan dan keterbukaan informasi kepada publik (Lukas, 2023).

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS mengandung makna keterbukaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan tentang bagaimana dana tersebut digunakan, siapa yang terlibat, dan hasil apa yang telah dicapai (Rachmawati, 2024). Transparansi menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana sekolah bersedia memberikan akses informasi yang jelas dan dapat

diakses oleh semua pihak, termasuk komite sekolah, guru, dan orang tua siswa. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik (Nurhayati et al., 2024).

Di Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* di bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengelolaan dana BOS.

Namun, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang belum maksimal dalam mempublikasikan laporan penggunaan dana kepada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun media digital sekolah (Hakim & Enjelita, 2025). Kondisi ini menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan di kalangan masyarakat dan memunculkan potensi ketidakpercayaan terhadap manajemen sekolah.

Selain itu, fenomena keterlambatan penyaluran dana BOS dan kurangnya pemahaman aparaturnya sekolah terhadap regulasi pengelolaan dana sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program (Batubara et al., 2023). Beberapa sekolah juga masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang merupakan instrumen utama dalam perencanaan keuangan sekolah. Ketidaksesuaian antara RKAS dan realisasi anggaran kerap berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas dan menurunnya efektivitas program BOS (Permata & Mustoffa, 2023).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS (Sudyartini & Wafa, 2024). Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik cenderung memiliki sistem pelaporan keuangan yang rapi, dokumentasi lengkap, dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, lemahnya akuntabilitas dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan anggaran, ketidaksesuaian data laporan, hingga menurunnya kualitas layanan pendidikan (Adil et al., 2023).

Dalam konteks SMP Negeri di Kota Bandar Lampung, penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting karena sekolah negeri merupakan lembaga publik yang dibiayai oleh negara.

Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Regulasi ini menegaskan bahwa sekolah wajib mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana BOS di tempat yang mudah diakses publik dan melibatkan komite sekolah dalam setiap proses pengambilan keputusan (Lukas, 2023). Meskipun demikian, sejumlah laporan masih menunjukkan adanya praktik pengelolaan yang belum sesuai prinsip transparansi. Beberapa sekolah di Bandar Lampung diketahui belum secara konsisten menampilkan laporan keuangan di papan pengumuman, dan sebagian besar pelaporan hanya dilakukan secara internal tanpa melibatkan masyarakat luas (Hakim & Enjelita, 2025). Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan wujud nyata dari transparansi publik yang dapat memperkuat rasa percaya terhadap lembaga pendidikan.

Di sisi lain, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Kompetensi kepala sekolah, bendahara BOS, dan tenaga administrasi dalam memahami mekanisme pelaporan keuangan sering kali masih terbatas (Nurhayati et al., 2024). Minimnya pelatihan dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait memperburuk situasi tersebut. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa di beberapa sekolah, pelaporan dana BOS sering terlambat karena keterbatasan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap sistem pelaporan digital yang diwajibkan pemerintah (Batubara et al., 2023).

Penelitian Hasrullah et al. (2024) menegaskan bahwa masih banyak lembaga pendidikan yang belum maksimal dalam memanfaatkan media publikasi digital untuk melaporkan keuangan sekolah. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi menjadi penyebab utama lemahnya transparansi. Kondisi ini juga dialami oleh beberapa SMP Negeri di Bandar Lampung yang masih berfokus pada pelaporan administratif tanpa memperhatikan aspek keterbukaan publik secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas aparatur sekolah dalam memahami regulasi dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital.

Keterlibatan komite sekolah dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS sering kali masih bersifat formalitas semata (Permata & Mustoffa,

2023). Padahal, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi jalannya pengelolaan keuangan sekolah. Minimnya partisipasi aktif komite dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap kejujuran pengelolaan dana publik.

Dalam konteks pengawasan, masih terdapat kelemahan dalam sistem monitoring dan evaluasi internal sekolah. Mekanisme pelaporan triwulanan yang seharusnya dilakukan secara rutin belum berjalan efektif di seluruh satuan pendidikan (Adil et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem kontrol internal yang berfungsi memastikan bahwa setiap kegiatan dan pengeluaran telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan eksternal dari dinas pendidikan juga perlu dioptimalkan untuk menjaga integritas pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah menengah pertama.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih dalam. Kajian ini tidak hanya relevan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang baik, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan dana negara di bidang pendidikan. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan (Nurintan et al., 2025).

Penelitian ini juga penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana BOS telah diinternalisasi oleh sekolah-sekolah negeri di daerah perkotaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah dan nasional dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas manajemen sekolah (Hakim & Enjelita, 2025).

Pada akhirnya, penerapan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bentuk komitmen moral lembaga pendidikan terhadap publik. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus menumbuhkan budaya terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pengelolaan dana publik. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih

mendalam mengenai implementasi transparansi pengelolaan dana BOS dalam mewujudkan akuntabilitas di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana BOS berperan dalam mewujudkan akuntabilitas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerapan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh atau dampak transparansi pengelolaan dana BOS terhadap terwujudnya akuntabilitas di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai pengelolaan keuangan pendidikan, khususnya dalam konteks penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana BOS di sekolah negeri. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan teori manajemen keuangan publik di sektor pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pihak sekolah, dinas pendidikan, serta pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana BOS.

Bagi kepala sekolah dan bendahara, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengawasan keuangan sekolah agar lebih efektif dan efisien (Hakim & Enjelita, 2025).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dua prinsip utama dalam tata kelola pendidikan yang baik. Kedua prinsip ini menjadi landasan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan serta memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS masih ditemukan di berbagai satuan pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah (Nurintan, 2025). Oleh karena itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk memberikan gambaran empiris serta menjadi dasar analisis terhadap kondisi di SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Penelitian terdahulu menjadi rujukan dalam memahami sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tata kelola dana BOS telah berjalan secara efektif di berbagai wilayah Indonesia. Setiap penelitian memiliki fokus yang beragam, mulai dari analisis efektivitas pengelolaan dana BOS, faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas, hingga upaya peningkatan transparansi berbasis digital (Sudyartini & Wafa, 2024). Melalui pemetaan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat diketahui pola umum permasalahan yang muncul, termasuk kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi cenderung lebih mudah diterapkan dibandingkan akuntabilitas. Hal ini disebabkan karena transparansi dapat dilakukan melalui publikasi data dan laporan keuangan, sedangkan akuntabilitas membutuhkan sistem pertanggungjawaban yang menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan akhir (Hasrullah et al., 2025). Beberapa penelitian juga menyoroti keterlibatan komite sekolah dan masyarakat sebagai faktor penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi pengelolaan dana BOS (Nurhayati et al., 2023).

Melalui kajian terhadap sepuluh penelitian terdahulu berikut, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas dana BOS diterapkan di berbagai konteks, termasuk permasalahan dan solusi yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya. Analisis ini menjadi dasar penting dalam mengembangkan arah penelitian di SMP Negeri Kota Bandar Lampung agar dapat memperkuat tata kelola keuangan sekolah yang lebih baik dan berintegritas (Arlen, 2023).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu tentang Transparansi dan Akuntabilitas BOS

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi & Perbedaan
1	Nurintan et al. (2025)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP di SDIT Al-Mumtaz Jayanti	Deskriptif Kuantitatif	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP.	Relevan dengan penelitian ini karena menilai hubungan kedua variabel utama, berbeda pada objek (SDIT).
2	Arlen (2023)	Transparansi Pengelolaan Dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta	Kualitatif	Transparansi sudah baik, tetapi aspek pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan.	Relevan karena fokus pada transparansi di SMP, berbeda lokasi penelitian.

3	Adil et al. (2023)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Lau, Maros	Kualitatif Deskriptif	80% prinsip akuntabilitas sudah diterapkan, namun belum sepenuhnya terbuka ke publik.	Relevan karena menilai dua prinsip utama, berbeda konteks geografis.
4	Batubara et al. (2023)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS di SMP Negeri 3 Mandailing Natal	Kualitatif	Akuntabilitas baik, transparansi masih rendah karena kurang publikasi informasi.	Relevan karena menyoroti hambatan keterbukaan informasi; perbedaan pada konteks daerah.
5	Nurhayati et al. (2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SMP di Kolaka Timur	Kualitatif	Faktor internal seperti kompetensi SDM memengaruhi akuntabilitas	Relevan karena menganalisis faktor penghambat akuntabilitas ; berbeda variabel tambahan
6	Hakim & Enjelita	Transparansi dan Akuntabilitas	Kualitatif Deskriptif	Transparansi sudah diterapkan, namun akuntabilitas masih	Relevan dan kontekstual; berbeda

	(2025)	s dalam Penggunaan Dana BOS di Sekolah dan Madrasah		terkendala pelaporan.	pada perbandingan sekolah dan madrasah.
7	Hasrullah et al. (2025)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS di MIM Tamacinna	Kualitatif	Transparansi diterapkan melalui pelibatan pihak sekolah, namun publikasi data masih kurang.	Relevan karena menunjukkan hambatan publikasi; berbeda jenis lembaga pendidikan.
8	Rachmawati (2024)	Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS dalam RKAS di SDN Made 1 Surabaya	Kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas sudah baik, melibatkan komite sekolah.	Relevan karena membahas mekanisme RKAS; berbeda tingkat pendidikan.
9	Permata & Mustoffa (2023)	Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS	Kualitatif	Pelaksanaan belum optimal karena kurang melibatkan wali murid.	Relevan karena sama-sama SMP; berbeda pada konteks

		terhadap RKAS SMP Sunan Kalijaga			partisipasi masyarakat.
10	Sudyartini & Wafa (2024)	Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di Kota Yogyakarta	Kuantitatif	Kedua variabel berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	Relevan dan mendukung teori hubungan variabel; berbeda lokasi dan pendekatan analisis.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas, terlihat bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan tema besar, yaitu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di berbagai satuan pendidikan. Secara umum, mayoritas penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini mampu menggambarkan proses pengelolaan dana BOS secara nyata di lapangan (Hakim & Enjelita, 2025). Namun, terdapat pula penelitian dengan metode kuantitatif seperti dilakukan oleh Nurintan et al. (2025) dan Sudyartini & Wafa (2024) yang menekankan hubungan antara variabel transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana.

Dari sisi hasil penelitian, sebagian besar menunjukkan bahwa penerapan transparansi lebih mudah diwujudkan dibandingkan akuntabilitas. Hal ini disebabkan transparansi dapat dilakukan dengan mekanisme sederhana seperti pengumuman laporan keuangan, publikasi di papan informasi, atau penyampaian kepada Komite Sekolah (Rachmawati, 2024). Sebaliknya, akuntabilitas memerlukan sistem pertanggungjawaban formal, pelaporan periodik, dan

pengawasan berlapis yang seringkali belum optimal, terutama di sekolah dengan keterbatasan sumber daya manusia (Nurhayati et al., 2023).

Beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya kompetensi SDM pengelola dana BOS sebagai faktor penentu keberhasilan penerapan akuntabilitas. Keterbatasan pemahaman teknis dan kemampuan pelaporan digital menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang akuntabel (Hasrullah et al., 2025). Selain itu, partisipasi masyarakat dan komite sekolah juga terbukti berpengaruh terhadap peningkatan keterbukaan informasi, sebagaimana dijelaskan oleh Arlen (2023) dan Permata & Mustoffa (2023) yang menemukan bahwa pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah.

Di sisi lain, terdapat perbedaan kontekstual antara setiap penelitian. Misalnya, penelitian di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan hasil yang lebih baik dalam penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis digital, sedangkan penelitian di daerah seperti Maros dan Mandailing Natal masih menghadapi kendala administratif dan keterbatasan akses teknologi (Adil et al., 2023; Batubara et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa faktor geografis dan infrastruktur turut memengaruhi tingkat keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi kesenjangan empiris yang masih ada, terutama terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung Melalui konteks lokal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola keuangan sekolah serta memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan sistem akuntabilitas publik di bidang pendidikan (Suryani, 2024).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Grand Theory: Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu administrasi publik yang menekankan bagaimana pemerintah dan lembaga publik mengelola sumber daya, proses, serta

kebijakan dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Satibi, 2012). Dalam konteks pemerintahan modern, manajemen pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai dasar berpikir untuk memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan dalam praktik pengelolaan dana publik, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SMP Negeri.

Dalam studi manajemen publik, orientasi pelayanan menjadi titik sentral karena pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan publik berujung pada kemaslahatan warga negara (Revida et al., 2021). Teori manajemen pelayanan publik menegaskan bahwa setiap aktivitas pelayanan publik harus dilandasi prinsip keadilan, efisiensi, dan keterbukaan. Artinya, penyedia layanan publik, seperti satuan pendidikan, harus menjamin bahwa setiap proses penggunaan dana publik dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini menjadi bentuk konkret dari implementasi nilai-nilai manajemen publik dalam sektor pendidikan.

Secara konseptual, manajemen pelayanan publik berangkat dari asumsi bahwa organisasi publik memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memberikan pelayanan yang bernilai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sudarmanto et al., 2020). Dalam hal ini, pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai kewajiban birokrasi semata, melainkan sebagai manifestasi dari kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara. Dengan demikian, teori ini memandang pelayanan publik sebagai sistem yang melibatkan interaksi antara penyedia layanan, penerima manfaat, dan mekanisme pengawasan publik.

Eko Sudarmanto dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa pengelolaan sektor publik harus dilakukan dengan pendekatan manajerial yang rasional, efisien, dan berbasis hasil (*result oriented management*) agar mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan birokrasi yang semakin kompleks

(Sudarmanto et al., 2020). Dalam konteks lembaga pendidikan, pendekatan ini mengarahkan sekolah untuk menjalankan fungsi manajerialnya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Dengan demikian, penerapan teori manajemen pelayanan publik membantu menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Ismail Nurdin menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik ditentukan oleh perilaku aparatur dan efektivitas komunikasi birokrasi dalam melayani masyarakat (Nurdin, 2019). Dalam kerangka teori manajemen pelayanan publik, kedua aspek tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Aparatur publik yang profesional tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Hal ini menuntut adanya perubahan paradigma dari rule-driven bureaucracy menjadi service-oriented bureaucracy, di mana fokus utama adalah pada kepuasan penerima layanan.

Erika Revida dan tim (2021) menambahkan bahwa pelayanan publik harus diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya publik secara efisien, efektif, dan etis. Dalam pandangan mereka, manajemen pelayanan publik yang baik tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap warganya. Oleh karena itu, dalam penerapannya, teori ini mendorong adanya partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pelayanan

Penerapan teori manajemen pelayanan publik dalam konteks pengelolaan dana BOS menjadi relevan karena sekolah merupakan institusi publik yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS adalah bentuk konkret dari pelaksanaan nilai-nilai pelayanan publik, di mana masyarakat, khususnya orang tua dan komite sekolah, berhak mengetahui serta mengawasi penggunaan dana tersebut (Satibi, 2012). Dengan demikian, teori ini

memberikan dasar normatif dan operasional dalam menilai sejauh mana lembaga pendidikan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dalam praktiknya, manajemen pelayanan publik di sektor pendidikan menuntut keterpaduan antara kebijakan, struktur organisasi, serta perilaku individu dalam mewujudkan layanan yang berkualitas (Nurdin, 2019). Oleh karena itu, implementasi teori ini di SMP Negeri Kota Bandar Lampung dapat dianalisis melalui sejauh mana kepala sekolah, bendahara, dan guru mampu menjalankan prinsip manajerial berbasis transparansi dan akuntabilitas. Kinerja pelayanan publik dalam konteks sekolah akan tercermin dari seberapa terbuka lembaga dalam mengelola dana BOS serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut.

Selain itu, teori manajemen pelayanan publik juga menekankan pentingnya komunikasi birokrasi yang efektif antara penyedia layanan dan penerima layanan (Revida et al., 2021). Dalam pengelolaan dana BOS, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pihak sekolah mampu menyampaikan informasi keuangan secara jelas, mudah dipahami, dan terbuka kepada masyarakat. Komunikasi yang baik akan memperkuat akuntabilitas publik karena masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan.

Dengan demikian, teori manajemen pelayanan publik menjadi grand theory yang tepat dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara tata kelola birokrasi pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Teori ini memberikan kerangka analisis yang menyeluruh untuk memahami bagaimana aparatur pendidikan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam praktik pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Pemilihan teori ini juga didasarkan pada kesesuaian konsepnya dengan nilai-nilai reformasi birokrasi dan good governance yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan (Sudarmanto et al., 2020).

2.2.2 Middle Theory: Governansi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan modern, yang dikenal

dengan istilah governansi digital. Konsep ini merupakan bentuk evolusi dari tata kelola pemerintahan tradisional menuju model pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi digital (Suriyani, 2025). Governansi digital tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi dalam pelayanan publik, melainkan juga mencakup transformasi budaya birokrasi, transparansi informasi, dan penguatan akuntabilitas publik. Dalam konteks pendidikan, governansi digital berperan penting dalam mendukung sistem administrasi sekolah, termasuk pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

Menurut Eddy Suriyani (2025), governansi digital menuntut adanya integrasi antara sistem digital, kebijakan publik, dan perilaku aparatur negara. Pemerintah, sebagai penyedia layanan publik, harus mampu mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, governansi digital tidak sekadar penggunaan perangkat elektronik, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan data publik. Artinya, digitalisasi tata kelola pemerintahan bertujuan untuk membangun hubungan timbal balik yang sehat antara pemerintah dan warga negara melalui mekanisme transparansi informasi.

Oktarizka Reviandani dan rekan-rekannya (2023) menjelaskan bahwa governance di era digital menghadirkan isu-isu kontemporer yang menantang, seperti perlindungan data, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik daring. Digitalisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah, sekaligus menuntut aparatur agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial digital. Dalam konteks pendidikan, digital governance memberikan peluang besar bagi lembaga sekolah untuk mengelola data keuangan, kegiatan akademik, serta pelaporan dana BOS secara terbuka melalui sistem daring yang dapat diakses oleh orang tua siswa dan masyarakat luas.

Governansi digital berfungsi sebagai sistem tata kelola yang berbasis data, di mana setiap kebijakan publik harus didukung oleh bukti digital yang

dapat diverifikasi (Sudirman, 2025). Dalam buku *E-Government: Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan*, Faturachman Alputra Sudirman menegaskan bahwa e-government merupakan pondasi utama dari governansi digital yang efektif. Melalui e-government, semua proses pelayanan publik dapat terdokumentasi secara sistematis, meminimalkan peluang korupsi, serta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi simbol komitmen terhadap prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.

Selain itu, Suriyani (2025) menyoroti bahwa keberhasilan governansi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia birokrasi. Aparatur publik perlu memiliki literasi digital yang memadai agar dapat mengoperasikan sistem dengan profesional dan bertanggung jawab. Dalam bidang pendidikan, hal ini berarti kepala sekolah, bendahara, dan staf administrasi harus mampu menggunakan sistem keuangan berbasis digital secara benar agar laporan dana BOS tersusun dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kemampuan digital yang baik, sekolah tidak hanya meningkatkan efisiensi manajemen, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Reviandani et al. (2023) menegaskan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan juga membawa perubahan dalam pola komunikasi birokrasi. Sebelumnya, komunikasi bersifat vertikal dan tertutup; kini menjadi lebih terbuka dan kolaboratif. Melalui platform digital, masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan, kritik, maupun pengawasan terhadap kebijakan publik. Dalam konteks sekolah, komunikasi digital dapat diwujudkan melalui portal transparansi BOS yang menampilkan laporan penggunaan dana secara berkala. Hal ini menciptakan hubungan dua arah antara pihak sekolah dan masyarakat, sehingga prinsip akuntabilitas publik benar-benar dapat diimplementasikan.

Dari perspektif manajemen publik, governansi digital memperluas jangkauan pelayanan publik dan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif (Sudirman, 2025). Penggunaan teknologi memungkinkan setiap

aktivitas administratif tercatat secara otomatis, sehingga kesalahan dan manipulasi data dapat diminimalisir. Bagi sekolah negeri di Kota Bandar Lampung, sistem pelaporan dana BOS yang terhubung secara digital dengan Kementerian Pendidikan menjadi salah satu wujud penerapan governansi digital.

Governansi digital juga memiliki dimensi etis dan sosial. Suriyani (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan tidak hanya menuntut perubahan teknis, tetapi juga perubahan sikap dan budaya birokrasi. Nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, serta integritas harus menjadi bagian dari ekosistem digital agar transformasi tersebut tidak sekadar menjadi formalitas. Dalam konteks sekolah, hal ini berarti setiap aktor pendidikan harus menanamkan etika pelayanan publik digital—bahwa setiap data dan laporan keuangan bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga moral kepada masyarakat.

Konsep governansi digital memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana inovasi teknologi dapat memperkuat tata kelola publik. Reviandani et al. (2023) menyebutkan bahwa keberhasilan digital governance bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketiganya berperan menciptakan ekosistem digital yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam sektor pendidikan, kolaborasi ini dapat terwujud melalui pengembangan sistem informasi keuangan sekolah yang memungkinkan pengawasan bersama antara pemerintah, kepala sekolah, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif semacam ini mendukung pencapaian good school governance.

Dengan demikian, governansi digital sebagai teori tingkat menengah (middle theory) memberikan jembatan antara teori manajemen pelayanan publik dan praktik transparansi di lapangan. Teori ini menekankan bagaimana teknologi dapat menjadi instrumen penguat nilai-nilai akuntabilitas dan efisiensi yang terkandung dalam manajemen publik. Dalam penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung, governansi digital menjadi pendekatan teoritik yang relevan karena mampu menjelaskan mekanisme konkret penerapan prinsip

good governance melalui sistem digital pendidikan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatif (Sudirman, 2025).

2.2.3 Applied Theory: Transparansi dan Akuntabilitas BOS

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pendidikan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Program BOS sejak tahun 2005 menjadi instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Namun, efektivitas pelaksanaan program ini tidak hanya diukur dari seberapa besar dana disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Transparansi berarti keterbukaan dalam penyusunan, penggunaan, dan pelaporan dana, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban setiap pihak yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip good governance.

Landasan hukum pelaksanaan program BOS bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya. Amanat ini kemudian dijabarkan melalui kebijakan BOS sebagai bentuk intervensi fiskal pemerintah untuk menjamin pemerataan kesempatan belajar. Dalam konteks teori akuntabilitas publik, penggunaan dana BOS harus dilaporkan secara terbuka, baik kepada masyarakat maupun lembaga pengawas, agar tercipta kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Akuntabilitas tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga moral dan sosial, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS menuntut agar setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat diakses oleh publik. Sekolah sebagai penerima dana berkewajiban untuk mengumumkan jumlah dana yang diterima, peruntukannya, serta laporan penggunaannya melalui papan informasi sekolah atau media digital. Hal ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana sehingga mencegah potensi penyimpangan dan memperkuat integritas lembaga pendidikan.

Akuntabilitas dana BOS tidak hanya terbatas pada pelaporan administratif kepada pemerintah daerah atau pusat, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban etis terhadap tujuan program. Sekolah dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan bukan sekadar memenuhi formalitas laporan keuangan. Dalam kerangka teori akuntabilitas publik, hal ini berarti setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri manfaatnya bagi peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan peserta didik. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas program BOS serta menjamin keberlanjutannya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ketika sekolah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan akan meningkat. Keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan prioritas sekolah. Dengan kata lain, partisipasi publik memperkuat legitimasi kebijakan BOS dan memperluas tanggung jawab moral pengelola pendidikan.

Sejak tahun 2012, mekanisme penyaluran dana BOS mengalami perubahan signifikan, yaitu dari pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah melalui pemerintah provinsi. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses distribusi serta mengurangi potensi kebocoran dana di

tingkat birokrasi. Namun, transformasi mekanisme ini juga menuntut peningkatan kapasitas akuntabilitas dan kompetensi aparatur sekolah dalam hal pelaporan keuangan. Sekolah dituntut untuk memahami prosedur administrasi, pelaporan, dan audit dana dengan lebih baik agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berimplikasi hukum.

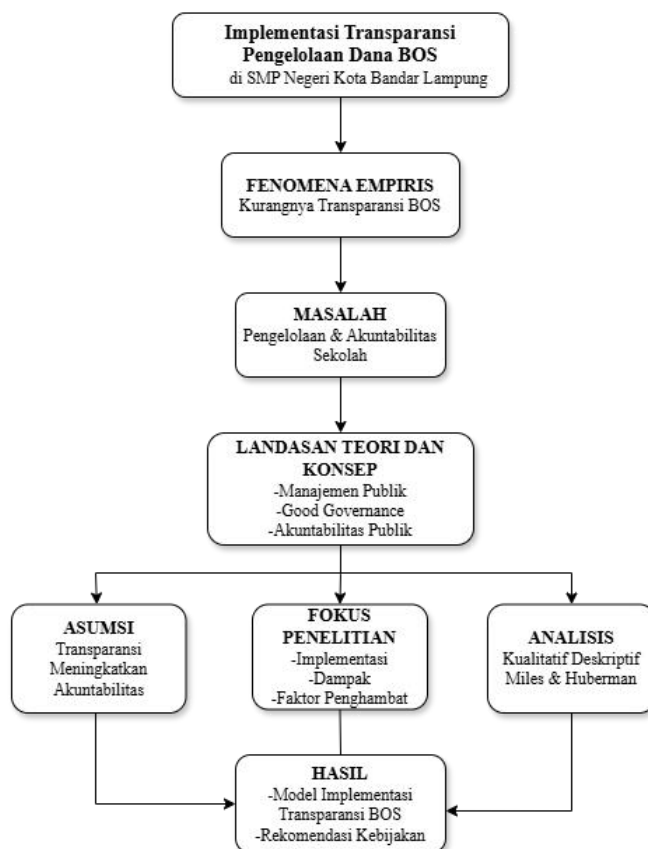
Dalam konteks teori tata kelola keuangan publik, akuntabilitas pelaporan BOS menuntut adanya sistem pengawasan internal dan eksternal yang terintegrasi. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat, BPK, dan masyarakat. Keterpaduan sistem pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan petunjuk teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Transparansi laporan yang dipublikasikan secara terbuka juga menjadi alat penting untuk mendorong efisiensi penggunaan dana dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam program BOS juga mencerminkan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam sektor publik. Sekolah sebagai lembaga publik harus terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan bagian dari praktik demokrasi fiskal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam tata kelola pendidikan. Prinsip ini memperkuat hubungan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sering kali menghadapi tantangan, seperti rendahnya kapasitas manajerial di tingkat sekolah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi teknis pelaporan. Kondisi ini sering menimbulkan ketidaktepatan laporan dan potensi penyimpangan penggunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola sekolah agar mampu melaksanakan prinsip good governance secara konsisten. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem digitalisasi pelaporan agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara real time dan efisien.

Secara keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS merupakan bentuk penerapan teori akuntabilitas publik dalam konteks pendidikan. Keterbukaan informasi, kejujuran dalam pelaporan, serta partisipasi publik merupakan pilar utama yang menjamin keberhasilan program ini. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dana BOS tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional dan menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir pada gambar tersebut menggambarkan hubungan sistematis antara pengelolaan Dana BOS, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dana BOS menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendukung pembiayaan operasional sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks ini, pengelolaan Dana BOS tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menekankan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang meliputi keterbukaan informasi, partisipasi publik, efektivitas penggunaan dana, serta pertanggungjawaban yang terukur. Transparansi pengelolaan Dana BOS diwujudkan melalui keterbukaan data keuangan kepada publik, pelibatan stakeholder seperti komite sekolah, guru, dan orang tua dalam pengawasan, serta publikasi laporan yang dapat diakses secara berkala.

Ketiga aspek tersebut secara sinergis membangun kepercayaan publik, yang menjadi dasar penting dalam menciptakan legitimasi sosial terhadap institusi pendidikan sebagai pengelola dana publik.

Selanjutnya, aspek transparansi dan efektivitas penggunaan dana berperan langsung dalam mewujudkan akuntabilitas sekolah. Akuntabilitas ini mencakup dua dimensi, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan berhubungan dengan sejauh mana sekolah mampu mengelola dan melaporkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundangan, sedangkan akuntabilitas kinerja mengukur sejauh mana penggunaan dana tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran, fasilitas, dan hasil belajar peserta didik. Ketika sekolah menerapkan prinsip transparansi dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, maka tingkat efektivitas penggunaan dana pun meningkat. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan pada akhirnya mendorong terciptanya tata kelola keuangan sekolah yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keseluruhan proses transparansi, partisipasi stakeholder, efektivitas penggunaan dana, serta akuntabilitas keuangan dan kinerja bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan. Ketika pengelolaan Dana BOS dilakukan secara terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk meningkatkan sarana pembelajaran,

kompetensi guru, serta kenyamanan peserta didik dalam belajar. Kualitas pendidikan yang meningkat menjadi bukti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di tingkat sekolah dasar dan menengah di daerah-daerah seperti Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti bermaksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, serta mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diterapkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Lampung. Peneliti berupaya memahami secara langsung pengalaman, pandangan, dan praktik para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh bersifat mendalam, naturalistik, serta mampu menampilkan realitas di lapangan sebagaimana adanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian objek penelitian dan kemudahan dalam memperoleh data yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Provinsi Lampung, yang dipilih secara purposive. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Lampung merupakan salah satu provinsi yang aktif dalam pelaksanaan program Dana BOS dan memiliki variasi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, lokasi ini dipilih karena memiliki akses yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi

secara langsung dari pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, bendahara BOS, guru, serta komite sekolah yang berperan dalam pengawasan.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), data penelitian adalah segala fakta dan informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, tindakan, dokumen, atau fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan interaksi dengan informan utama seperti kepala sekolah, bendahara BOS, guru, serta komite sekolah. Data ini mencakup pemahaman, pandangan, serta praktik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen resmi seperti laporan realisasi dana BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan, pedoman teknis BOS dari Kementerian Pendidikan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil temuan dari data primer agar penelitian menjadi lebih komprehensif dan objektif.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara alamiah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan kepada Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Kepala Sekolah, sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan program BOS di sekolah, yang memahami kebijakan, perencanaan, serta pelaporan penggunaan dana.
 - b) Bendahara BOS, sebagai pihak yang secara teknis mengelola keuangan, mencatat setiap transaksi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban dana BOS.
 - c) Guru, sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran dan penerima manfaat langsung dari penggunaan dana BOS, yang dapat memberikan perspektif terkait transparansi dan efektivitas penggunaan dana.
 - d) Komite Sekolah, sebagai representasi masyarakat yang berperan dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di sekolah.
 - e) Pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, sebagai informan pendukung yang memberikan informasi mengenai kebijakan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program BOS di wilayah setempat.
2. Observasi langsung, yaitu pengamatan aktivitas dan proses pengelolaan dana BOS di sekolah, termasuk cara penyampaian laporan kepada publik, penyimpanan dokumen, serta peran masyarakat dalam pengawasan.
 3. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari arsip laporan keuangan BOS, notulen rapat, papan pengumuman publik, dan kebijakan tertulis dari dinas pendidikan maupun sekolah terkait pelaksanaan BOS.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, menyintesis, menyusun pola, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dana BOS.
2. Penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan agar mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi), yaitu tahap menemukan makna dari data yang telah disusun dan memastikan validitasnya melalui pengujian ulang terhadap data yang telah dikumpulkan.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2019), keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Salah satu cara yang paling umum digunakan adalah teknik triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan tiga bentuk triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan seperti kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah.
2. Triangulasi metode, dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk melihat konsistensi data.
3. Triangulasi waktu, dengan melakukan pengumpulan data dalam waktu yang berbeda agar diperoleh hasil yang konsisten dan akurat.

Selain triangulasi, peneliti juga melakukan member check dengan mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada informan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak menyimpang dari makna yang dimaksud narasumber. Dengan demikian, keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(1), 45–58.
<https://doi.org/10.12345/jap.v8i1.2345>
- Andriani, T., & Sari, M. (2021). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2), 78–92.
- Aprilianti, D., & Nugroho, H. (2023). *Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 14(1), 55–70
- Astuti, R. (2020). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 112–128.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2023. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2022. Jakarta: Kemendikbud.
- Lestari, M., & Putra, D. (2022). Analisis Efektivitas dan Akuntabilitas Penggunaan Dana BOS di Sekolah Negeri Kota Metro. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 201–218.
- Mulyani, S., & Pratama, R. (2021). Transparansi Publik dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 17(2), 94–109.
- Nuridin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik). Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.

- Rahmawati, E. (2024). Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS melalui Sistem Pelaporan Digital di Sekolah Negeri. *Jurnal Teknologi dan Administrasi Pendidikan*, 6(1), 13–27.
- Ramadhan, B., & Yuliani, F. (2020). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Kependidikan*, 12(4), 256–270.
- Revida, E., Aisyah, S., Pardede, A. F., Purba, S., Hidayatulloh, A. N., Leuwol, N. V., Arfandi, S. N., Kato, I., Silalahi, M., & Manullang, S. O. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Reviandani, O., Hardjati, S., & Harmawan, B. N. (2023). *Governance di Era Digital: Isu-Isu Kontemporer*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sari, D. P., & Hidayat, A. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas di SMP Negeri Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Indonesia*, 9(2), 83–101.
- Satibi, I. (2012). *Manajemen Publik dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Bandung: UNPAS Press.
- Suryani, L., & Kurniawan, H. (2021). Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Penggunaan Dana BOS di Sekolah Negeri Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pendidikan*, 7(3), 147–162.
- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Pratiwi, N. A. N., Purba, B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., Silalahi, M., & Dewi, I. K. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudírman, F. A. (2025). *E-Government: Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyani, E. (2025). *Governansi Digital*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.